

TAJUK RENCANA

Penjabat Maju Pilkada

PEMERINTAH melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan penjabat (Pj) bupati, walikota, dan gubernur yang akan maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 agar mengundurkan diri aparat sipil negara (ASN). Hal itu mengingat tugas Penjabat adalah menjamin roda pemerintahan di daerah agar tetap berjalan hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Peringatan Mendagri tersebut disampaikan dalam fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yang digelar secara virtual, Kamis (20/6) lalu. Menurut Mendagri, tugas Penjabat Kepala Daerah adalah mengisi kekosongan menjelang munculnya kepala daerah pilihan rakyat.

Dengan tegas, Mendagri minta penjabat yang akan akan maju Pilkada 2024 harus mundur dari ASN paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran sebagai bakal pasangan calon. Untuk itu, Mendagri telah mengeluarkan surat rdaran pada 16 Mei 2024.

Mendagri menyebutkan, ada dua opsi penajbt kepala daerah mengundurkan diri sebagai ASN. Pertama, penjabat kepala daerah dapat mengundurkan diri secara terhormat, yakni mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran. Kedua, jika penjabat kepala daerah tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan dan mengikuti pilkada, maka yang bersangkutan akan diberhentikan oleh Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan penjabat kepala daerah yang akan maju Pilkada 2024 agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan pilkada, meskipun baliho tersebut dipasang oleh masyarakat.

Peringatan Mendagri tersebut tentu tidak main-main, sehingga tidak ada celah bagi penjabat kepala daerah yang akan maju Pilkada 2024 membodohi rakyat.

Di sisi lain, masyarakat saat ini sudah cerdas dan pasti akan bersikap terhadap penjabat yang curang untuk kepentingan Pilkada 2024. Siapapun penjabat yang akan maju Pilkada 2024, mestinya juga selalu bersikap bijak dan jujur kepada dirinya sendirinya maupun kepada masyarakat.

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu telah mengingatkan agar para aparat sipil negara (ASN) yang berstatus penjabat kepala daerah agar benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, jika akan maju dalam Pilkada 2024. Penjabat bupati maupun penjabat walikota yang sedang bertugas dan berkeinginan menjadi kontestan Pilkada juga diminta berpikir ulang.

Dalam perkembangannya, saat ini beberapa partai politik telah melakukan pendaftaran dan penjurangan bakal calon kepada daerah yang akan tampil dalam Pilkada 2024. Di sisi lain, juga telah bermunculan sosok-sosok yang menyatakan siap maju dalam Pilkada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka tidak hanya dari kalangan parpol tetapi juga dari lingkungan birokrasi.

Mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang semakin dekat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pesta demokrasi ini nantinya benar-benar dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Dalam kondisi saat ini, mestinya para ASN juga harus mamapu menjaga netralitas masing-masing. Untuk itu, juga perlu pengawasan ketat dari Kementerian Dalam Negeri. □

Doorprize Politik

Arga Pribadi Imanan

lakukannya. Para pendukung Jokowi mendapat kue kekuasaan yang telah tersaji. Prinsip ini telah dilakukannya selama hampir dua periode masa pemerintahan Jokowi. Dengan kata lain, dampak yang ditimbulkan ialah transaksi politik tinggi. Presiden Jokowi harus memastikan perhitungan politis dari para pendukungnya dapat terakomodir. Maka



KR-JOKO SANTOSO

dari itu tidak mengherankan kondisi bagi-bagi *doorprize* terjadi. Jika dilihat lebih kritis, kita dapat melihat peristiwa *reshuffle* kabinet sebagai upaya memastikan *doorprize* politik diterima bagi para pengusung Jokowi.

Poin kedua, lemahnya hubungan komitmen antara Presiden, partai politik dan konstituen. Hal ini mengantarkan kita kepada perdebatan klasik: ketika presiden terpilih, maka di manakah presiden terpilih menetapkan agenda komitmennya? Pada struktur pemerintahan kita, partai politik memainkan peran penting untuk melakukan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dari publik. Artinya, partai politik bertanggung jawab untuk menjadi organisasi lintas-batas dalam menyampaikan kehendak publik. Namun sayangnya, perilaku partai politik yang acapkali mengedepankan kepada *office-seeking* dan *vote-seeking* mendorong terhadap sikap pragmatisme (Mller & Str'm, 1999). Partai politik cenderung mengkalkulasikan diri terhadap keuntungan yang didapat apabila men-

duduki jabatan strategis dibandingkan memikirkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Komitmen Presiden pun terjerat dalam kepentingan partai politik untuk memberikan *doorprize* politik dan memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kepentingan publik. Jurang pemisah hubungan (*linkage*) yang lemah antara partai politik dengan konstituen kepada Presiden telah terjadi selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Masing-masing kelompok berjalan dengan agenda masing-masing.

Kabinet Berikutnya?

Berdasarkan dua poin di atas, kondisi yang terlihat menunjukkan tesis bahwa semakin besar koalisi partai politik, maka semakin besar *doorprize* politik yang harus disediakan. Langkah alternatif untuk meminimalisir risiko di atas ialah dengan menghadirkan tiga aspek. Pertama, penguatan dimensi kewargaan sehingga memunculkan naluri alamiah untuk berperan sebagai warga negara yang aktif. Kedua, memperkuat ideologi partai politik mengingat selama ini partai politik memiliki kecenderungan berjalan tak tentu arah tanpa garis ideologi yang pasti. Ketiga, memperkuat *linkage* di antara warga dan partai politik sehingga mekanisme *doorprize* politik tanpa undian yang tidak jelas bisa diminimalisir. Apabila kekuatan *linkage* dapat terjadi, maka kalkulasi *doorprize* politik cenderung lebih teroganisir, semisal pemilihan proporsi posisi antara teknokrat dengan politisi. Pertanyaan reflektif selanjutnya: akankah masa pemerintahan Prabowo-Gibran bernasib sama dengan pemerintahan Jokowi-Maifaru? Jika melihat kepada pernyataan di atas, kita dapat menarik kesimpulannya sendiri tentang imajinasi pemerintahan ke depan. □

*) **Arga Pribadi Imanan**, Dosen *Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM; Head of Research PARES.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Redaktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. **Langganan** per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Antara Museum Imersif dan Museum Partisipatif

Amos Ursia

REVITALISASI Museum Benteng Vredeburg menimbulkan kesan segar dan relevan dengan generasi muda hari ini. Langkah strategis yang dilakukan melalui Indonesia Heritage Society (IHA) seakan berbuah manis. Sambutan dan perayaan yang besar dianggap sebagai tanda antusiasme tinggi dari berbagai lapisan warga Yogyakarta.

Ruang-ruang diorama yang terkesan suram dan ketinggalan zaman telah berubah. Panel-panel yang sebelumnya tak banyak berubah jadi sangat canggih dengan teknologi imersif. Tindakan pengunjungan yang sebelumnya terbatas pada membaca keterangan kini jadi lebih interaktif. Banyak kesan positif yang mengapresiasi tampilan Museum Benteng Vredeburg kini.

Terlepas dari banyaknya apresiasi, revitalisasi museum dengan teknologi canggih itu perlu direfleksikan lebih mendalam. Terutama menyoal aspek distribusi infrastruktur dan praktik tata kelola museum-museum lain di Yogyakarta. Sebab, bagaimana dengan nasib museum-museum yang dikelola mandiri hingga terbengkalai? Lalu, bagaimana dengan pelibatan warga secara luas dalam praktik tata kelola museum?

Arus Teknologi Imersif

Museum di seluruh penjuru Indonesia seperti dilanda tantangan yang sama. Penggunaan teknologi digital menjadi tuntutan zaman yang niscaya dan tak terhindarkan. Kata kunci digitalisasi semacam jadi slogan dan metode kerja yang digalakkan untuk museum. Penggunaan teknologi imersif kemudian jadi salah satu pendekatan yang sering digunakan.

Diorama patung berubah menjadi hologram dan video digital yang selalu bergerak, lengkap dengan efek-efek multimedia yang canggih dan memukau seluruh aspek indrawi. Istilah *virtual reality* hingga *augmented reality* kesannya terlalu sering digaungkan. Sementara itu modal finansial dan akses infrastruktur digital masih jadi isu serius. Sebab, kemudian hari hal itu bisa memantik persoalan ketimpangan dan kesenjangan.

Faktanya, ada tiga puluh lima muse-

um di DIY yang terdata dalam data referensi Kemdikbudristek. Jika ditambah dengan berbagai jenis museum, ada sekitar lima puluh lebih. Persoalan teknologi tingkat tinggi nan canggih kemudian jadi isu penting, terutama dalam museum-museum yang tersebar di seluruh penjuru Yogyakarta.

Jika teknologi imersif menjadi acuan tunggal untuk menarik atensi publik, maka berapa banyak modal hingga infrastruktur yang diperlukan untuk mengejar acuan tersebut? Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah timpangnya akses dan metode kerja berbasis teknologi untuk museum-museum kebanyakan. Sementara signifikansi historis hingga sosial tiap-tiap museum tak bisa dibandingkan. Museum Dr Yap Prawirohusodo kemudian menjadi penting untuk mengingat peran sosial Dr Yap, begitu juga Museum Dewantara Kirti Griya yang signifikan bagi sejarah pendidikan hingga pergerakan anti-kolonial. Belum lagi Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang sentral bagi sejarah pergerakan perempuan.

Museum yang Partisipatif

Alih-alih bergantung pada teknologi imersif dan berbagai olahan digitalnya, penting pula memikirkan aspek partisipatif. Iain Chamber dalam buku *"The Postcolonial Museum: The Arts of Memory and the Pressures of History"* menulis pentingnya pelibatan warga.

Museum perlu menjadi ruang perayaan ingatan warga, di mana teknologi bukan mengasingkan warga dengan sejarah miliknya. Melainkan ada keterlibatan untuk mengingat dan berpartisipasi secara aktif, bukan sekadar menonton atraksi kecanggihan teknologi. Acuan yang berbasis nilai dan ingatan kewargaan jelas lebih substansial.

Mencari titik keseimbangan ja-

di tantangan bersama. Teknologi imersif perlu ditempatkan sebagai peranti semata bagi museum. Apa yang lebih mendasar adalah distribusi pengetahuan yang bergerak dalam interaksi dan partisipasi kewargaan. Terutama museum-museum kebanyakan dengan segala keterbatasan akses dan modal infrastrukturnya.

Warga Yogyakarta bisa berbahagia dengan hadirnya aktivasi museum secara rutin oleh beberapa komunitas. Misalnya, komunitas Malam Museum hingga beberapa komunitas tur jalan kaki (*walking tour*) seperti Alon Mlampah dan Walk The Past. Sebab, partisipasi ini justru digerakkan oleh generasi muda secara organik dan nirlaba.

Aspek penting yang terjalin kemudian adalah pertukaran pengetahuan, perawatan nilai-nilai historis, hingga perayaan ingatan milik warga. Inisiasi berbasis komunitas yang organik itu justru menyebar secara merata, bahkan dalam museum yang terkesan sepi pengunjung di penjuru Yogyakarta. Alih-alih menerlurkan kebijakan eksklusif nan satu arah, arif nampaknya untuk mengapresiasi dan menggulirkan metode partisipasi publik secara inklusif. □

*) **Amos Ursia**, penulis dan peneliti independen.

Pojok KR

Sebanyak 165 WNI yang saat ini berada di berbagai negara terancam hukuman mati.

-- Hak perlindungan!

Harga eceran tertinggi Minyakita akan naik jadi Rp 15.500 perliter.

-- Nasib pedagang kecil?

Jaga hubungan industrial, keberadaan Serikat Pekerja tidak bisa disepelekan.

-- Bisa diistimewakan?

Beraksi